

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 149 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2018 TENTANG TIM
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan pejabat/pegawai dari instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan penilaian Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tim Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tim Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENILAIAN REFORMASI
BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2018

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	: Sarah Sadiqa	750.000
2.	Ketua	: Iwan Herniwan	650.000

3.	Anggota	:	1. Jhon Piter H. Situmorang	500.000
			2. Dwi Wahyuni Kartianingsih	500.000
			3. Fadli Arif	500.000
			4. Gatot Pambudhi Poetranto	500.000
			5. Tatang Rustandar Wiraatmadja	500.000
			6. M. Aris Supriyanto	500.000
			7. R. Fendy Dharma Saputra	500.000
			8. G. A. A. Diah Ambarawaty	500.000
			9. Sutan Suangkupon Lubis	500.000
			10. Yulianto Prihhandoyo	500.000
			11. Suharti	500.000
			12. R. Adha Pamekas	500.000
			13. Yasip Khasani	500.000
			14. Tjipto Prasetyo Nugroho	500.000
			15. Hermawan	500.000
			16. Yuyu Yulianti	500.000
			17. M. Firdaus	500.000
			18. M. Andhika Rangga Lazuardi	500.000
			19. M. Adiwibowo Soedarmo	500.000
			20. Mirna Medita Endikasari	500.000
			21. Andy Martanto	500.000
			22. Devi Yanurida	500.000
			23. Nicke Kusuma Devi	500.000
			24. Arso Hadi Wardono	500.000
			25. Satriyo Wibowo	500.000
			26. Firmansyah	500.000
			27. Festiana Niyanti	500.000
			28. Tri Susanto	500.000
			29. Vina Da'watul Aropah	500.000
			30. Disty Ratna Putri Indrasari	500.000
			31. Angga Widita Amirul	500.000
			32. Resa Anggriani	500.000
			33. Rovazio Okiiza	500.000
			34. Yudi Prasetiawan	500.000
			35. Rinaldi Morintosh	500.000
			36. Arif Budiman	500.000
			37. Mahsa Elvina Rahmawyanet	500.000
			38. Eva Nurdinna Agustini	500.000
			39. Bambang Saputra	500.000
			40. Juniarty Erika Magdalena	500.000
			41. Ardian Hoppin Sitompul	500.000
			42. Oktrita Purwantari Rahayu	500.000
			43. Eben Henry Reagen	500.000

		44. Estu Retno Yuliati	500.000
		45. Didi Permana K.	500.000
		46. Ch. Ayu Suci Ati	500.000
		47. Dwi Hendri Cahyadi	500.000
		48. Mario Duwi Cahyo	500.000
		49. Elvi Egyasti	500.000
		50. Intan Dana Lestari	500.000
		51. Tri Tarwoco	500.000
		52. Anita Meilani	500.000
		53. Angky Dwi Seffyanto	500.000
		54. Lailatul Mufarokhah	500.000
		55. Rizky Arimawati	500.000
		56. Afri Dian Setiyani	500.000
		57. Imelda Liliana	500.000
		58. Agung Ismail	500.000
		59. Hilma Oktaviani	500.000
		60. Prima Salti	500.000
		61. Setiawan Rahandi Sabri	500.000
		62. Katriasih Dwi Hartati	500.000
		63. Rasmita Juliana Sitepu	500.000
		64. Seno Haryo Wibowo	500.000
		65. Makkiyah Farizqi	500.000
		66. Inamawati Mastuti Dewi	500.000
		67. Canggih Hangga Wicaksono (Pejabat/Staf Kemen PAN & RB)	500.000
		68. Hendi Renaldo (Pejabat/Staf Ombudsman)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO